

**MODEL PENGANGGARAN TERPADU BERBASIS  
*PRIORITY QUALITY*; STUDI SEKOLAH DASAR INTEGRAL  
LUKMAN HAKIM JEMBER**

**Zainuddin Al Haj Zaini**  
Institut Agama Islam Negeri Jember  
zainuddinzaini@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam pengelolaan mutu pendidikan diperlukan tiga hal yang berkaitan yaitu kecukupan sumber daya pendidikan, mutu proses pendidikan dan mutu output pendidikan. Manajemen pembiayaan merupakan bagian sumber daya pendidikan yang dapat menentukan keberhasilan mutu pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen produksi yang menjamin terlaksananya kegiatan dan program yang sesuai standart mutu pendidikan, karena itu pemerintah melalui PP nomor 19 tahun 2005 menetapkan standart pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah permasalahan manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan: Prinsip, proses dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan rancangan multikasus. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi peran serta dan study dokumentasi. Sementara analisis data dilakukan dua tahap, yakni analisis data kasus individu dan analisis data lintas kasus. Sedangkan pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah yang dikembangkan berdasarkan ; (a) nilai ibadah/religius, (b) biaya pendidikan ditanggung bersama, (c) kualitas pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing, (d) dapat memenuhi standart mutu pendidikan nasional /internasional, (e) pengelolaan biaya pendidikan dijalankan

dengan amanah dan jujur. Prinsip yang dipergunakan adalah ; amanah, jujur, gotong royong, tepat sasaran, efektif, adil, berbasis prioritas dan berkesinambungan. (2) Proses manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah/madrasah dilaksanakan melalui; (a) perencanaan menerapkan pendekatan penganggaran terpadu berbasis prioritas, (b) pelaksanaan menerapkan program grade based system, (c) evaluasi menerapkan model internal, (d) pertanggung jawaban menerapkan model audit keuangan dan kinerja pengelolaan biaya pendidikan. (3) Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah/madrasah dilakukan dengan (a) Penyusunan anggaran (budgeting) melalui RKAS dan RKAM. (b) Pembukuan (*accounting*) dilakukan bendahara yayasan sekolah/madrasah. (c) Pemeriksaan (*auditing*) dilakukan pimpinan yayasan dan stakeholder..

**Kata Kunci :** *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Peningkatan mutu sekolah.*

## PENDAHULUAN

Salah satu problem pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan serta satuan pendidikan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah, hal ini terlihat jika dibandingkan dengan Negara lain. Unesco<sup>1</sup> bulan Nopember 2013, melaporkan bahwa dari 130 negara, peringkat Indonesia di bidang pendidikan turun dari 58 ke 62 di bawah Malaysia yang berada di urutan 50 dan Vietnam yang berada di urutan 57. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia juga tercermin pada kesulitan perubahan mencari tenaga kerja. Daya saing Indonesia menurut World Economic Forum 2012-2013 berada di level 54 dari 131 negara. Jauh di bawah peringkat daya saing sesama negara ASEAN, seperti Malaysia yang berada di urutan ke-21 dan Singapura di urutan ke-7.

Manajemen pembiayaan merupakan bagian sumber daya pendidikan

---

<sup>1</sup> Laporan UNISCO pada jurnal intertional Education for word, Nopember 2013. Laporan ini juga dikutip oleh Jalal, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Peningkatan Mutu, (Jogyakarta; Karya Nusa, 2011), 7

yang menentukan keberhasilan mutu pendidikan, ia merupakan komponen produksi yang menjamin terlaksananya kegiatan dan program yang sesuai standart mutu pendidikan<sup>2</sup>, karena itu pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 menetapkan standart pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan. Namun ironis dalam realitasnya masih terjadi berbagai bentuk penyimpangan anggaran pendidikan dengan berbagai macam alasan<sup>3</sup>

Pembiayaan pendidikan di sekolah, khususnya aspek manajerial, hingga kini masih menjadi problem krusial, hal ini *dijustificasi* oleh beberapa penelitian sebelumnya, misalnya hasil kajian Pusat Balitbang Depdiknas yang menyebutkan bahwa besaran biaya satuan pendidikan keseluruhan di SD sebagian besar (73,53%) menjadi beban orangtua. Demikian pula biaya satuan pendidikan keseluruhan SMP (70,88%) masih menjadi tanggungan orangtua siswa. Hal ini dikarenakan anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen penunjang, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan fisik sekolah, pengadaan buku pelajaran, dan semacamnya<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan prinsip, proses dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di SD Integral Lukman Hakim Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan manajemen pendidikan Islam khususnya mengenai konsep dan model manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dalam peningkatan mutu sekolah.

## METODE PENELITIAN

Data-data yang didapatkan dalam penelitian tentang manajemen pembiayaan sekolah dasar ini melalui observasi peran serta, wawancara mendalam dan study dokumentasi. Informan dalam penelitian ini tidak ditentukan seberapa banyak jumlahnya, melainkan dipilih secara sengaja

---

<sup>2</sup>Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah*, (Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam & Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2003) 14

<sup>3</sup>Lutfi Hasyim, *Arah Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004),17

<sup>4</sup>Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (Jakarta, Depdiknas, 2009) 22

(*purposif*) beberapa orang yang memenuhi kriteria dan menguasai informasi secara mendalam serta dipercaya menjadi sumber data yang mantap, kompeten dan kredibel mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah. Pemilihan informan ini tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

## PEMBAHASAN

### Penguatan Prinsip Penganggaran; Langkah Kongkrit Integritas Lembaga

Dalam manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas publik, efektifitas dan efisiensi.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi yang turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi pada pengelolaan pembiayaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan di SD Integral Lukman Hakim dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan atau pengendalian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Lukman Hakim yang menjelaskan

“Pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan di sekolah kami diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Secara rinci tentang hal ini dijelaskan oleh Riyanto, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : BPFE, 2004) 50, Bandingkan dengan Husnan : *Manajemen Pembiayaan : sebuah Pengantar*. (Jakarta : Hafana Press, 1996) 87

<sup>6</sup>. Wawancara dengan Kepala SD Integral Lukman Hakim

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan dalam sumber pembiayaan dan jumlah nominalnya, rincian penggunaannya, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Terkait dengan prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Integral Lukman Hakim, Imam Syafi'i (guru) mengemukakan bahwa ;

“Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut menuntut kemampuan kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.<sup>7</sup>

Transparansi pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat.

### **Proses Pengelolaan Pembiayaan SD Integral Lukman Hakim**

Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Integral Lukman

---

<sup>7</sup>. Wawancara dg Imam Syafi'i

Hakim mencakup empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Azimatul Khairot mengatakan;

“Proses pembiayaan pendidikan di lembaganya mencakup empat kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban. Proses pengelolaan keuangan pendidikan mempunyai substansi pada sisi aktivitas adalah proses pengaturan dan proses ini menjadi suatu keharusan bagi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Lazimnya manajemen keuangan pendidikan Islam mengandung beberapa fungsi yang akhirnya berujung pada pemanfaatan dana pendidikan Islam secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam”<sup>8</sup>

Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di lembaganya difahami sebagai suatu proses keseluruhan, semua kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyakut analisis sumber- sumber pendapat pendidikan saja, namun lebih pada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Administrasi keuangan/ pembiayaan pendidikan, meliputi keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung/ sumbangan pengembangan pendidikan, uang seragam, uang peralatan sekolah, uang SPP, dll<sup>9</sup>

Menurut Ahmad Rohmat (guru), proses pengelolaan keuangan SD Integral Lukman Hakim bersifat *centralistik*, disebutkan bahwa;

“Proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Integral Lukman Hakim dikelola secara menyeluruh oleh Kepala Sekolah dan bendahara sekolah, sehingga dalam pengelolaannya SD Integral Lukman Hakim bersifat terpusat (*centralistik*). Dalam perencanaan pembiayaan SD Integral Lukman Hakim memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan kemudian data dan informasi tersebut dikaji yang pada ahirnya nanti disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBS.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Azimatul Khairot

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhsinun

<sup>10</sup> Wawancara ahmad Rohmat

Berdasarkan hasil observasi tentang kegiatan perencanaan keuangan di SD Integral Lukman Hakim, diketahui bahwa di lembaga ini dilakukan tiga kegiatan yaitu:

*Pertama* perumusan tujuan. Perumusan tujuan yang ingin dicapai dibuat berdasarkan visi SD Integral Lukman Hakim adalah terwujudnya sekolah unggul baik imtaq dan iptek, berwawasan kebangsaan, disiplin tinggi, dan tanggap lingkungan. Sedangkan misinya adalah ; (1) Menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan dan kekeluargaan pada seluruh warga sekolah, (2) Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat. (3) Menumbuhkan semangat patriotisme melalui peringatan hari-hari besar nasional. (4) Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. (5) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. (6) Menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis (PAIKEM). Dan (7) Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis.

*Kedua* memilih program. Dalam memilih program yang akan dilakukan dalam setahun kedepan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dengan memperhatikan perkiraan besarnya sumber dana yang dapat diperoleh dan sumber daya lainnya, serta sumber daya manusia yang ada.

Identifikasi dan pengerahan sumber daya yang ada. Identifikasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak, yang kemudian diidentifikasi oleh direktur dan pembantu direktur. Data dan informasi ini berupa sumber daya manusia, sarana maupun dana atau biaya.<sup>11</sup>

Dari paparan diatas sudah jelas bahwa apa yang menjadi tujuan pembiayaan dari Pendidikan Islam sebagai hal pokok dan urgen serta hal utama dalam peningkatan kualitas mutu suatu pendidikan, dengan pembiayaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam maka akan senantiasa memudahkan untuk pengelolaan baik bersifat sarana dan prasarana, proses pembelajaran, ataupun kegiatan hal lain yang terkait

---

<sup>11</sup>. Hasil Observasi SD Integral Lukman Hakim

dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan pada lembaga pendidikan Islam tersebut. Jadi tanpa pembiayaan maka lembaga pendidikan akan sulit untuk mengembangkan kualitas mutu.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disebutkan bahwa proses pengelolaan pembiayaan pendidikan di SD Integral Lukman Hakim adalah mencakup empat kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban

### **Strategi Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Upaya Peningkatan Mutu Sekolah**

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya, karena segala kegiatan yang dilakukan sekolah perlu dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan.

Proses diatas memerlukan manajemen strategis yang berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarafisik dan keuangan, untuk mewujudkan interaksi optimal dengan lingkungan sekitarnya. Strategi sekolah dalam menggali dana pendidikan secara administratif sangat tepat karena berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan sekolah

Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kepala Sekolah SD Integral Lukman Hakim, M. Solehan dalam kaitan ini mengemukakan;

Hal paling krusial yang dihadapi pendidikan kita adalah masalah pembiayaan/keuangan, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen pembiayaan sekolah.

Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun pembiayaan berkaitan dengan sarana-prasarana dan sumber belajar. Berapa banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Di lembaga ini strategi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan tiga cara, yakni : *Budgeting* (penyusunan anggaran), *Accounting* (pembukuan) dan *Auditing* (pemeriksaan). Dengan strategi ini diharapkan lembaga pendidikan Islam menjadi kuat, bermutu dan berdaya saing sehingga standart nasional pendidikan (SNP) dapat terpenuhi.<sup>12</sup>

Pernyataan kepala sekolah SD Integral Lukman Hakim, di atas dikuatkan oleh Imron April Yani (Waka Sarana) yang menyebutkan bahwa;

Segala kegiatan yang dilakukan sekolah perlu dana. Pada dasarnya penyelenggaraan pendidikan perlu biaya, Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan dan pelaksanaan program supervisi, penggajian dan kesejahteraan para guru dan staf lainnya, kesemuanya itu memerlukan anggaran dan keuangan.<sup>13</sup>

Biaya merupakan elemen yang sangat penting walaupun bukan satu-satunya komponen yang paling penting. Bagaimanapun bagusnya rancangan kurikulum, matangnya perencanaan pendidikan, akan tetapi ketika sampai pada tahap operasional dan terbentur adanya keterbatasan biaya maka perencanaan yang bagus tersebut kurang memiliki makna yang berarti, bahkan mungkin program pendidikan yang direncanakan sulit terealisasikan.

Sementara Imam Syafi'i (Waka Kurikulum) mengemukakan ;

Strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di SD Integral Lukman Hakim dilakukan melalui penyelenggara berbagai kegiatan, sebagai berikut: (1) Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumber dana;

---

<sup>12</sup>. Wawancara dengan M. Sholehah tanggal 05 Juli 2014

<sup>13</sup>. Wawancara dengan Imron April Yani

(2) Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang dapat digali dan dikembangkan; (3) Menetapkan sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun ajaran, dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah, menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, dan menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pembiayaan pendidikan sekolah dilakukan oleh (1) Otorisator: pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. (2) Ordonator: pejabat yang berwenang melakukan pengujian memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. (3) Bendaharawan: pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.

Menurut Zahrotul Mufidah (guru) Secara umum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, disebutkan :

Pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifik mengenal pembiayaan pendidikan ini.<sup>15</sup>

Keinginan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan tantangan bagi SD Integral Lukman Hakim yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Keberhasilan SD Integral Lukman Hakim membentuk opini yang positif masyarakat bahwa proses dan hasil pembelajaran di sekolah itu bermutu merupakan indikasi bahwa sekolah itu

---

<sup>14</sup>. Wawancara dg Imam Syafi'i

<sup>15</sup>. Wawancara, Zahrotul Mufidah tanggal 08 Juli 2014

telah berhasil memuaskan pelanggannya. Mutu ada kalanya terbentuk melalui opini masyarakat yang merasa terpuaskan dengan proses dan hasil pendidikan yang diselenggarakan oleh SD Integral Lukman Hakim .

Kepuasan pelanggan pendidikan (orang tua peserta maupun dunia usaha) merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Walaupun kepuasan itu sifatnya berbeda antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Seorang warga masyarakat akan merasa puas terhadap proses pendidikan karena anaknya sebagai peserta didik telah mengalami perubahan baik sikap, perilaku, dan juga karena bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan anaknya. Sementara itu masyarakat merasa dipuaskan karena anaknya telah mendapatkan pekerjaan dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang diperolehnya dari SD Integral Lukman Hakim

Kepuasan itu diartikan sebagai implikasi dari proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Dalam kenyataannya tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan bermutu. Sekolah yang melakukan proses yang bermutu akan memuaskan orang tua peserta didik. Sebaliknya semua sekolah melakukan hal yang sama sehingga bukan orang tua saja yang terpuaskan, tetapi juga akan meningkatkan jumlah siswa berprestasi sehingga memudahkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sekolah bermutu adalah sekolah yang dapat mencapai tujuan dan dapat memuaskan seluruh masyarakat yang memanfaatkan jasa sekolah itu.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Prinsip manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah yang dikembangkan berdasarkan: (a) nilai ibadah/religius, (b) biaya pendidikan ditanggung bersama, (c) kualitas pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing, (d) dapat memenuhi standart mutu pendidikan nasional /internasional, (e) pengelolaan biaya pendidikan dijalankan dengan amanah dan jujur. Prinsip yang dipergunakan adalah : amanah, jujur, gotong royong, tepat sasaran, efektif, adil, berbasis prioritas dan berkesinambungan. (2) Proses manajemen

pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah/madrasah dilakukan melalui : (a) perencanaan penganggaran terpadu berbasis prioritas, (b) menerapkan program *grade based system*, (c) evaluasi menerapkan model internal, (d) pertanggung jawaban menerapkan model audit keuangan dan kinerja pengelolaan biaya pendidikan. (3) Strategi manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah/madrasah dilakukan dengan : (a) Penyusunan anggaran (*budgeting*) RKAS dan RKAM. (b) Pembukuan *accounting*) dilakukan bendahara yayasan sekolah/madrasah. (c) Pemeriksaan (*auditing*) dilakukan pimpinan yayasan dan stakeholder secara objektif dan berkelanjutan. Sedangkan temuan formal penelitian ini adalah “Model penganggaran terpadu berbasis *priority quality*”.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen. Depdiknas, 2004)
- Asmani, Jamal, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. (Yogyakarta: Diva Press.2009)
- Husnan, *Manajemen Pembiayaan : sebuah Pengantar*. (Jakarta : Hafana Press, 1996)
- Laporan UNISCO pada jurnal *Intertional Education for word*, Nopember 2013. Laporan ini juga dikutip oleh Jalal, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Peningkatan Mutu*, (Jogyakarta; Karya Nusa, 2011)
- Lutfi Hasyim, *Arah Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta, Aditya Pustaka, 2004)
- Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah*, (Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam & Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2003)
- Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (Jakarta, Depdiknas, 2009)
- Riyanto, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta : BPFE, 2004)
- Tim Depdiknas, *Manajemen Mutu Berbasais Sekolah* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2004)